

Vaksin Covid-19 Merah Putih Disiapkan untuk Program Vaksinasi Ulang

“Targetnya adalah vaksin Merah Putih bisa ikut terlibat dalam bagian akhir program vaksinasi nasional atau menjadi booster dan juga semacam persiapan vaksinasi ulang,” kata Bambang Brodjonegoro.

JAKARTA (IM) - Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, riset vaksin Covid-19 Merah Putih masih berlangsung. Vaksin ditargetkan akan dipakai dalam

bagian akhir program vaksinasi nasional.

Menurut Bambang, masih belum diketahui akan seperti apa akhir dari pandemi korona. Sementara itu, antibodi yang dihasilkan dari program vaksinasi saat ini mungkin tidak akan bertahan seumur hidup. Oleh karena itu di masa

depan ada kemungkinan diperlankan program vaksinasi ulang.

“Targetnya adalah vaksin Merah Putih bisa ikut terlibat dalam bagian akhir program vaksinasi nasional atau menjadi booster dan juga semacam persiapan vaksinasi ulang,” kata Bambang dalam konferensi daring oleh UGM Science Techno Park, Kamis (4/3).

“Karena ada kemungkinan daya tahan tubuh yang kita dapatkan sekarang, termasuk Sinovac, tidak akan bertahan seumur hidup. Sehingga persiapan untuk vaksinasi ulang atau booster itu menjadi sangat diperlukan,” ujarnya.

Bibit vaksin Merah Putih disebut akan diserahkan ke Bio Farma pada Maret 2021.

Selanjutnya, vaksin akan melewati uji klinis fase I, II, dan III, serta dievaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapat izin penggunaan.

Sementara di tempat terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tantangan vaksinasi covid-19 Indonesia paling utama adalah jumlah stok vaksin. Namun, Budi menyebut RI sudah jauh lebih beruntung dibandingkan beberapa negara.

“Tantangan paling besar, satu itu jumlah vaksinnya, ini rebutan di seluruh dunia banyak negara yang even belum dapat bahkan belum mulai. Kita even dibandingkan beberapa negara ASEAN dan

beberapa negara maju sudah alhamdulillah bisa mulai” kata Budi dalam konferensi pers Kamis (4/3).

Budi menegaskan tengah berupaya mempercepat vaksinasi covid-19 agar cepat rampung, setidaknya sesuai target yaitu satu tahun selesai. Hal ini dikarenakan perkiraan antibodi vaksin corona bertahan selama satu tahun.

“Cuma yang ingin saya sampaikan vaksin ini kan minimal selesai 1 tahun seperti yang bapak presiden sampaikan. Karena memang kekebalannya kita estimasi, belum ada yang pasti, itu kira-kira sekitar 1 tahun, jadi sebelum itu hilang, ya kita harus selesai vaksin,” tandasnya. ● tom

Redakan Nyeri Sinus Bisa Dilakukan di Rumah



JAKARTA (IM) - Tidak sedikit orang mengalami apa yang disebut dengan nyeri sinus. Sinus terdiri dari dua jenis, akut dan kronis. Sinusitis kronis membutuhkan obat yang tepat. Namun kabar baiknya sinusitis akut ternyata juga dapat dirawat di rumah.

Sebelum Anda pergi ke dokter, berikut lima pengobatan rumahan yang bisa dicoba, seperti dilansir Times of India.

Pertama, minum banyak air. Mencegah seseorang dari dehidrasi adalah cara terbaik untuk meredakan penyakit ini. Seseorang harus mengonsumsi lebih banyak cairan untuk mendapatkan kelegaan dari nyeri sinus. Cairan membantu dengan mengencerkan lendir dan dengan demikian

membawa kelegaan ke saluran hidung.

Kedua, gunakan uap air. Uap membantu saluran hidung tersumbat. Anda tidak memiliki alat pengukus, rebus air, ambil handuk dan tambahkan mint ke dalam air, lalu hisap uapnya.

Ketiga, makan sup panas. Secangkir sup panas dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Anda dapat memilih sup apa saja yang Anda sukai, sesuai selera Anda. Uap dari sup dan bahan-bahan sehat di dalamnya dapat membantu membersihkan sinus Anda.

Keempat, cuka apel. Cuka apel memiliki banyak manfaat kesehatan dan salah satunya adalah menghilangkan sakit sinus. Minumlah cuka sari apel dengan air hangat atau teh untuk meredakan nyeri sinus. ● tom

SAMBUNGAN

Gun Gun menyarankan, sebaiknya pesan Presiden dapat menjadi gambaran kebijakan yang dijalankan.

“Sebaiknya ke depan komunikasi presidensial itu jauh lebih menggambarkan representasi kebijakan apa yang dikehendaki. Menghindari polemik yang tidak perlu,”

katanya.

Presiden Jokowi mengaungkan pernyataan benci produk luar negeri dalam rapat kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, ha-

rus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri,” kata Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak

negeri.

“Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga, betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia,” sebut Jokowi.

Jokowi ingin agar pelaku

DARI HAL 1

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih banyak mengeksport produk.

“Saya minta agar UMKM dibantu agar lebih mampu untuk ekspor. Tadi sedikit sudah saya singgung, kita perlu lebih banyak UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar,” kata Jokowi. ● mar

Presiden Jokowi yang Gaungkan...

retaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai penerima suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

Nurdin diduga menerima suap Rp2 miliar dari Agung Sucipto melalui perantara Edy Rahmat. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya. Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang berkaitan proyek di Sulsel.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● mar

KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar...

Uang tersebut diamankan saat menggeledah empat lokasi berbeda. Diantaranya rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah, rumah dinas Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, kantor dinas PUTR. Dan rumah pribadi tersangka Agung Sucipto (AS). Agung merupakan penyup Nurdin Abdullah.

“Berikutnya terhadap uang tersebut akan diverifikasi dan dianalisa mengenai keterkaitannya dengan perkara ini sehingga segera dapat dilakukan

penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Keduanya yakni, Sek-

retaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai penerima suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

Nurdin diduga menerima suap Rp2 miliar dari Agung Sucipto melalui perantara Edy Rahmat. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya. Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang berkaitan proyek di Sulsel.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● mar

Kasus Gayus Jilid II di Ditjen Pajak...

imkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelanggaran ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (4/3).

“Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Ali saat ditanya apakah yang dicegah ke luar negeri salah satunya bernama Angin Prayitno Aji. Dia diketahui menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, tetapi profilnya di situs Ditjen Pajak

hilang usai Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons perihal kasus itu beberapa waktu lalu.

Setelahnya Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, menerangkan sejumlah nama yang diminta KPK dicegah ke luar negeri. Arya hanya menyebutkan inisial, yaitu APA, DR, RAR, AIM, VI, dan AS.

Pencegahan ke luar negeri telah berlaku mulai 8 Februari 2021 sampai 5 Agustus 2021. Arya menyebutkan 2 inisial, yaitu APA dan DR, adalah aparat sipil negara atau ASN di Ditjen Pajak.

“Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap dua orang ASN Direktorat Jenderal Pajak Kement-

rian Keuangan,” kata Arya.

Lantas secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan biasanya setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akan dicegah ke luar negeri. Namun Alexander tidak menjawab detail siapa tersangka dalam perkara suap di Ditjen Pajak.

“Umumnya setiap tersangka yang ditetapkan itu kita cekal ke luar negeri,” ucap Alexander saat ditanya apakah tersangka di kasus Ditjen Pajak sudah dicegah ke luar negeri.

Diberitakan sebelumnya, Alexander membeberkan modus suap di Ditjen Pajak seperti kasus-kasus suap yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, suap di Ditjen Pajak terkait pengu-

rusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.

“Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, gimana caranya supaya WP (wajib pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan,” kata Alex kepada wartawan di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (2/3).

Alex menyebut kasus suap ini diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Suapnya diduga bernilai puluhan miliar rupiah.

Menghadapi potensi munculnya Gayus jilid II, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung membebastugaskan pejabat bersangkutan meski belum diumumkan siapa petinggi DJP

tersebut.

Sri Mulyani bilang kasus suap terjadi pada 2020. Saat ini Kemenkeu juga mengusut penyup atau wajib pajaknya.

“Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi seluruh jajaran DJP dan Kemenkeu yang tengah terus berfokus melakukan pengumpulan penerimaan negara,” kata Sri Mulyani, Rabu (3/3).

Sejak mencuat kasus Gayus Tambunan sekitar tahun 2010, terjadi berkali-kali pengkhianatan serupa seperti diungkap oleh Sri Mulyani. Dalam rentang sekitar 10 tahun terakhir, KPK menangani beragam korupsi dengan tersangka pegawai dan pejabat pajak. ● mar

Dramatis, Tentara Selamatkan...

Unit Operasi Komando Pertahanan Udara dan Pesisir Angkatan Laut Kerajaan Thailand 491, dengan rompi pelampung, harus rela berenang sejauh 15 meter menuju perahu yang terbalik.

Dia berhasil menyelamatkan empat kucing “ginger cat” berwarna oranye yang terlihat berkumpul bersama-sama ber-

pegangan pada struktur derek saat api menelan perahu.

Tim penyelamat membawa kucing-kucing itu ke perahunya dengancara mearoh kucing itu di pundaknya saat berenang. Kemudian tim yang ada di atas kapal menaikinya dengan tali.

“Ketika kami tiba, itu untuk mengamankan reruntuhan dan memeriksa tumpahan

minyak. Tapi kami melihat ada kucing di dalamnya,” terang Thatsaphon.

“Saya segera melepas baju saya dan memakai jaket pelampung agar saya bisa terjun ke laut. Nyala api ada di bagian belakang perahu tetapi mulai tenggelam, jadi saya tahu saya harus cepat,” lanjutnya.

“Saya sangat lega jika kami

dapat menyelamatkan anak-anak kucing itu. Mereka akan tenggelam atau mati kehausan jika mereka pergi ke laut,” ujarnya.

Kucing-kucing itu sekarang dirawat oleh penyelamat mereka di pos komando mereka di Pulau Koh Lipe.

Gubernur Satun Ekarat Lishen mengatakan tangki minyak di kapal yang teng-

gelam rentan bocor, yang akan menyebabkan kerusakan terumbu karang atau terkumpul di permukaan laut.

“Kami sekarang bekerja dengan agen terkait untuk menghubungkan dan berkoordinasi dengan pemilik kapal untuk menemukan cara menyelamatkan bangkai kapal,” ungkapnya. ● osm

Bertambah 7.264 Kasus Positif...

diterima wartawa, Kamis (4/3) sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan pembaruan yang muncul setiap sore.

Selain itu, [emerintah juga mencatat ada penambahan 6.440 pasien Covid-19 yang sembuh. Dengan demikian,

total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 1.176.356 orang sejak awal pandemi.

Selain itu, dalam 24 jam terakhir ada 176 orang yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif virus korona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19

di Indonesia tercatat sebesar 36.897 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 147.845 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 67.095 orang yang kini berstatus suspek.

Kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 63.051 spesimen dalam sehari. Pada periode 3-4 Maret 2021, ada 38.493

orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 11.004.843 spesimen dari 7.329.345 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali. ● osm

Tiga Pasal Multitafsir di UU ITE

JAKARTA (IM) - Pasal 27, 28, dan 29 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan pasal-pasal multitafsir, yang bisa diartikan berbeda-beda.

“Pasal-pasal tersebut tidak memenuhi syarat legalitas,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Kamis (4/3).

Eddy, sapaan Wamenkumham, menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci

dalam diskusi publik bertajuk, “Peningkatan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP” di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/3).

Ia menjelaskan bahwa suatu norma dapat memenuhi syarat legalitas harus berpegang pada empat syarat mutlak. Pertama tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya, kedua tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis, ketiga tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas, dan

keempat tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Eddy menilai Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat. “Sehingga benar yang dikatakan presiden, itu (Pasal 27, 28, dan 29) multitafsir,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memberikan arahan tentang UU ITE yang disusun dengan semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Tapi belakangan ini, pembelajaran UU ITE justru menimbulkan keresahan karena memunculkan aksi saling lapor di masyarakat.

Arahan presiden tersebut, menurut Eddy, menjadi momentum untuk mengkaji kembali Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tersebut.

“Arahan Presiden, kalau menimbulkan ketidakadilan, maka perlu direvisi atau hapus pasal-pasal karet,” kata Eddy.

Pemerintah telah membentuk tim kajian UU ITE di

bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam). Pemerintah membentuk dua tim sekaligus.

Satu tim bertugas untuk membahas pedoman penerapan UU ITE sehingga tidak menjadi undang-undang dengan pasal karet yang bisa mengriminalisasi masyarakat yang mengkritik.

Satu tim lagi bertugas untuk menyiapkan rencana revisi beberapa pasal yang dianggap multitafsir di UU ITE. ● mar

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularso.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, A. Sumardi, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen), **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro), Soar Siringoringo.
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro), Riston Pardamean Lubis, Kartoni Lubis.
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500,-/leks (di luar kota Rp 3.000,-/leks), Harga Langganan Rp 50.000,-/Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab pencetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Telp : 021-6265566 pesawat 4000
 Fax : 021-639.7652.
 Twitter: International Media @redaksi_IM